

DEMOKRASI DAN KOMUNISME

Abstraksi

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion ; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance. (article-18, universal declaration of human right)

Sebenarnya mungkin itulah orientasi statemen Gus Dur atas usulan untuk mencabut Tap MPRS NO XXV/1996, dalam hal menghilangkan diskriminasi ideologi (komunisme) sekaligus mengembangkan proses demokratisasi di Indonesia dan rasa kemanusiannya, karena banyak mereka yang tidak bersalah menanggung sesuatu yang tidak semestinya serta mewujudkan proses rekonsiliasi nasional, walaupun konsekwensi dari pernyataan kontroversi tersebut berdampak dicuatkannya akan diadakan sidang tahunan menjadi sidang istimewa, tapi belakangan tuntutan tersebut melemah dan akan tetap dikembalikan seperti semula sebagai progest report presiden dalam sidang tahunan kemungkinan diadakannya sidang istimewa dan pergantian presiden, itu jelas salah, tidak bertanggung jawab dan melanggar UUD'45. padahal kita diam seribu bahasa ketika Amin Rais menawarkan Draft negara Federasi, itupun sebenarnya menyalahi kontitusi, tetapi tidak ada yang "menjastifikasi" dan memang Amin pun berhak mengusulkan sesuai konsepnya, karena setiap masyarakat /warga negara bebas untuk mengekspresikan setiap pendapatnya begitu pula Amin Rais –kontek negara demokrasi-, tetapi kenapa dia menanggapi usulan Gus Dur begitu, sangat disayangkan ketua dewan kita tidak demokratis, apa jadinya negara ini jika pemimpin-pemimpin kita tidak mengedepankan kepentingan nasional?, dan kita pun tahu kontroversi itu sendiri merupakan wujud dari demokrasi.

Pemahaman Demokrasi

Democratie, leterlijk : volksheerschappij. (De term volk-D; is dus een zinloos pleonasme). Wordt in de politiek gebruikt voor die staatsvorm, waarin de hoogste machet aan het volk behoort. In de Oudheid oefende het volk die macht ook zelf uit in Volksverganering. In de moderne tijd is echter her vertegen woordigend stelsel algemeen, waarbij de aan het toekomstige nacheit wordet uitgeoefend door een gekozen volksvertegen woordiging. Soms echter berust de beslieding nog bij het volk (De Kleine Winkler Prins Encyclopaedie jilid 1 : A- H hal, 460).

Eichler melihat demokrasi identik dengan demokratisasi. Sehingga dapat diambil kesimpulan seperti apa yang dikatakan Samuel P. Huntington, Direktur center for international Affair (CFIA), Universitas Harvard, " Demokrasi adalah suatu proses terus menerus yang kini tidak dapat dikembalikan lagi". Terus demokrasi pun harus kita pandang sebagai cara mencapai tujuan, dan bukan tujuan itu sendiri, maka logikanya adalah bahwa suatu bentuk demokrasi tidak dapat diterapkan begitu saja; secara kaku dan dogmatis, jika diperkirakan akan justru merusak atau mengganggu hasil-hasil positif perkembangan negara yang telah dicapai *absurd* untuk melakukan hal-hal demikian. Jadi bila paham komunisme/markisme (TAP MPRS NO XXV/1966) di cabut itu menyebabkan permasalahan karena dikhawatirkan terjadi perebutan kekuasaan lagi, karena gaya yang sering dipakai untuk merebut kekuasaan hampir sama di setiap negara, seperti : pertama, dalam propaganda mengklaim dirinya pemilik rakyat yang memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial. Di negara agraris seperti Unisovyet,

kaum komunis menekankan perlunya land reform dan mendukung perebutan oleh petani, bahkan sebelum mereka memegang tali pemerintahan. Dan apa yang dilakukan kaum komunis Cina yang memaklumkan dirinya sebagai pembaharu dalam bidang agraria. Kedua, teknik yang digunakan kaum bolshevik adalah mengadakan infiltrasi kedalam partai politik, basis buruh, dewan tentara, pemerintah daerah dan tempat-tempat strategis lainnya. Ketiga, yang lebih ekstrim biasanya kaum bolshevik dalam revolusinya memakai kekerasan (violence). Dan masyarakat komunis yang dicita-citakan oleh Marx merupakan masyarakat yang tidak mengenal kelas (classless society) yaitu dimana manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi dan tidak ada eksploitasi, penindasan dan paksaan. Akan tetapi merupakan hal yang aneh bahwa, untuk mencapai masyarakat yang bebas dari paksaan itu, perlu melalui jalan kekerasan dan paksaan, yaitu dengan perebutan kekuasaan oleh kaum buruh dari tangan kapitalis. Maka daripada itu lebih baik TAP tersebut dibiarkan adanya karena waktunya belum tepat, itupun disebabkan karena kesenjangan ekonomi simiskin dan sikaya terlalu lebar, supremasi hukum yang belum setabil, menjamurnya dekadensi moral dan korup yang semakin menjadi-jadi. Sebenarnya rekonsiliasi sangatlah bagus namun untuk menggapainya memerlukan waktu, jadi harus melewati tahapan-tahapan selian mengatasi permasalahan kemiskinan, korupsi dan dekadensi moral diperlukan terlebih dahulu rehabilitasi hak-hak mereka itu, karena paham komunis mengeksploitasi hal-hal yang demikian. Tapi kita harus menghargai kebebasan berpendapat apabila warga negara atau masyarakat mengusulkan untuk mencabutnya, serta kita pun harus menyikapinya dengan bijak bukan menghujat atau mengadilannya. Karena yang esensial dari demokrasi itu sendiri adalah proses, maka demokrasi yaitu suatu nilai yang dinamis, karena nilai esensialnya adalah proses yang lebih maju dan lebih baik dibanding yang telah dialami oleh suatu masyarakat atau negara. Karena pengertian demokrasi sebagai cara atau proses, tidaklah mengherankan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi sangat beragam dari satu negara dengan negara lainnya. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat sedangkan cratien diartikan pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokrasi yang sering kita pahami adalah pemerintahan dari oleh untuk rakyat. Indonesia sendiri menganut demokrasi yang berlandaskan pancasila yang masih dalam taraf perkembangan serta mengenai sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran pikiran dan pandangan, tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok konsitusi yang cukup tersirat di UUD 1945, selain dari itu juga UUD kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu.

Perkembangan demokrasi

Paham demokrasi sudah lama dimuka bumi ini, yaitu sejak jaman keemasan kebudayaan Yunani. Telah banyak berbicara dal hal ini sarjana Yunani kuno, semacam Plato dan lain-lain, dan walaupun sebenarnya yang telah diperaktikan di Yunani sangat jauh dari sempurna. Paham demokrasi tumbuh dan berkembang beribu tahun sesudahnya itu, sehingga dewasa ini kita melihat berbagai macam paham, cara dan policy dari negara-negara diberbagai dunia yang semuanya menamakan pelaksana atau penganut demokrasi, dan pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa azas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau yaitu gagasan dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta peran-peran agama, sehingga pembontakan terhadap raja-raja absolut ini didasarkan atas suatu teori rasionalitas yang mengaju pada konsep demokratis. Pada

dasarnya teori-teori kontrak sosial/rasionalitas merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintah absolut serta menetapkan hak-hak politik rakyat pada akhir abad ke-19. Ghagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkrit sebagai program sistem politik. Demokrasi dalam tahap ini semata-mata bersipat politis dan mendasarkan dirinya atas asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak (equal right) serta hak pilih untuk warga negara (universal suffrage).

Refleksi komunisme

Karl Mark sebenarnya sedikit sekali mengomentari masalah agama, akan tetapi meskipun sedikit kritiknya terasa sangat tajam dan bagi penguasa gereja pada waktu itu sangat menyakitkan. Komentarnya yang paling terkenal tentang agama dicetuskan pada tahun 1843, ketika parbangsawan Eropa dan penguasa gereja telah menikmati hasil kolusi untuk mempertahankan 'hak-hak istimewa' mereka. Bagi Karl ekspresi kehidupan beragama padadasarnya merupakan ekspresi penderitaan sosial. Agama adalah keluhan kesah warga masyarakat yang terindas. Agama adalah sentimen dunia yang tidak berprikemanusiaan, candu masyarakat yang hanya memberikan penenang sementara, semu tapi tidak mampu membongkar dan menghilangkan kondisi-kondisi yang menimbulkan penderitaan, dan menilai agama dan penguasa gereja sebagai kekuatan konservatif yang mengganggu penalaran dan kemerdekaan manusia untuk membangun dunianya secara otonom, tanpa dikekang oleh tangan Tuhan yang hadir melalui kekuasaan lembaga dan penguasa agama. Selama manusia masih mengundang campur tangan Tuhan untuk mengatur hidupnya, selama itu juga manusia membunuh kreatifitas dan kemerdekaannya sendiri sehingga da yang mengklaim komunisme itu atheis. Dalam aksi di negara kita kalau melihat sejarahnya, komunis memang gagal menguasai Indonesia walaupun menggunakan berbagai cara, tetapi mereka pernah menjadi salah satu empat partai besar, yaitu pada tahun 1955 yang perlu kita waspada walapun kini Uni Sovyet sudah lumpuh dan keropos karna kebangrutan ekonomi dan tangan Tuhan (The hand of the god). Tapi kita tetap tidak boleh mendeskridtkannya dan juga merampas hak-haknya apalagi mereka yang tidak tahu-menahu dan bersalah. Kita menyadari pula bahwa usulan bukan berarti mengembangkan ataupun menganjurkan serta usulan pun tidak harus terealisasi. Sebenarnya haruslah bertrima kasih karena usulan tersebut menjadi sebuah wacana dan sekaligus pencerahan serta langkah maju terhadap proses demokrasi di negara Indonesia tercinta ini.

KEPUSTAKAAN

Budiarjo Meriam. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta 1972 Diana Rakyat Press.

Fuadi. Komunis lahir lagi, Yogyakarta, 1997.

Luthann Thar. Universal declaration of human right ; article 18, 1979

Hidayat K. Tiga model hubungan agama dengan demokrasi, Jakarta 1994

Majid Nurholis. Demokrasi politik, agama dan ekonomi. 201'1994

Rully Ips. Democration and moslem. New York, 1983

Diterbitkan di Jurnal; Buana, Edisi XVII Th. 2000